

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Kecurangan (*Fraud*)

2.2.1 Definisi Kecurangan (*Fraud*)

Menurut ACFE (2016), *fraud* merupakan tindakan yang melanggar hukum dan dilakukan secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu seperti manipulasi atau memberi informasi keliru dari dalam atau dari luar suatu organisasi untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri ataupun kelompok secara langsung atau tidak langsung sehingga dapat merugikan pihak lain.

Menurut Albrecht & Zimbelman (2012) *fraud* dan kesalahan yang tidak disengaja (*unintentional error*) adalah sesuatu yang tidak sama atau berbeda. Jika terdapat seorang individu yang memasukkan angka yang salah dalam laporan keuangan dikarenakan adanya kekeliruan, maka hal tersebut tidak dapat digolongkan sebagai tindakan kecurangan karena dilakukan secara tidak sengaja. Namun jika individu tersebut melakukan perubahan angka pada laporan keuangan secara sengaja dengan maksud untuk mempercantik laporan keuangan dan menarik calon investor maka hal tersebut tergolong sebagai tindakan kecurangan.

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012) menjabarkan pengertian dari *fraud* atau kecurangan merupakan “Tindakan yang terdapat didalam bidang akuntansi berupa: (1) Salah saji yang muncul karena adanya tindakan kecurangan pada laporan keuangan berupa penghilangan angka secara disengaja atau pengungkapan dengan tujuan untuk menyesatkan pengguna laporan keuangan, (2) Salah saji yang muncul karena adanya perlakuan tidak semestinya pada aktiva (biasanya dikenal dengan penyalahgunaan atau penggelapan) berkaitan dengan pencurian aktiva entitas sehingga mengakibatkan penyajian laporan keuangan tidak dilakukan sesuai dengan prosedur dan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.”

2.2.2 Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Association of Certified Fraud Examiners (2019) mengategorikan *fraud* atau kecurangan menjadi tiga bentuk yaitu:

1. Korupsi

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 korupsi dijelaskan sebagai tindakan melawan hukum yang dilakukan seorang individu sebagai upaya untuk menguntungkan serta memperkaya diri sendiri/orang lain/suatu organisasi, menyalahgunakan jabatan atau kewenangan yang dimilikinya sehingga menimbulkan kerugian bagi negara. Korupsi merupakan kejahatan kerah putih yang paling sering terjadi diantara kecurangan lainnya. Korupsi dapat berupa penyuapan, konflik kepentingan, pemberian tanda terima kasih yang tidak sah dan pemerasan secara ekonomi. Berdasarkan *Association Fraud Examiners* (ACFE) hampir 90% kerugian akibat korupsi ditimbulkan dari tindakan penyuapan (Wulandari & Marwata, 2020).

2. Penyalahgunaan Aset

Tuanakotta (2010) menyebutkan penyalahgunaan aset merupakan kecurangan yang melibatkan pencurian atas aset secara tidak sah atau ilegal yang dilakukan oleh individu yang diberikan wewenang untuk mengelola ataupun mengawasi aset tersebut. Penyalahgunaan aset sebuah perusahaan atau lembaga dibagi menjadi dua macam yaitu:

- Penyalahgunaan aset berupa kas. Misalnya: penggelapan kas, menggunakan cek dari pelanggan, menahan cek pembayaran untuk vendor.
- Penyalahgunaan aset berupa non-kas. Misalnya: memakai fasilitas yang dimiliki oleh perusahaan untuk kepentingan individu yang tidak berkaitan dengan kegiatan perusahaan.

3. Kecurangan Laporan Keuangan

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (2020) kecurangan laporan keuangan adalah keadaan dimana suatu karyawan perusahaan melakukan tindakan salah saji atau kelalaian informasi bersifat material secara sadar atau sengaja dalam pembuatan laporan keuangan.

2.2.3 Kecurangan Laporan Keuangan

Kecurangan laporan keuangan dijelaskan sebagai tindakan salah saji atau *misstatement* baik *overstatements* (penyajian aset atau pendapatan yang lebih tinggi dari yang seharusnya) maupun *understatements* (penyajian aset atau pendapatan yang lebih rendah dari yang seharusnya) yang terdiri dari dua bentuk yaitu *financial* dan *non-financial* (Tuanakotta, 2014). Willingham & Elliott (dalam Matangkin & Mardiana, 2018) mengatakan kecurangan laporan keuangan lebih berfokus terhadap tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja oleh perusahaan publik dalam memberikan informasi keliru sehingga menyesatkan pengguna laporan keuangan. Menurut SAS No.99 (AICPA 2002), kecurangan laporan keuangan bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu :

1. Catatan akuntansi maupun dokumen pendukung laporan keuangan yang dimanipulasi atau dipalsukan.
2. Isi laporan keuangan secara sengaja berisi informasi yang keliru.
3. Menyalahgunakan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah, klasifikasi, cara penyajian atau pengungkapan.

2.2 *Fraud Triangle*

Teori *fraud triangle* disebut juga dengan teori segitiga kecurangan ini dicetuskan oleh Donald R. Cressey (1953) dalam disertasinya. *Fraud triangle* mengatakan adanya tiga faktor penyebab berupa tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*) dan rasionalisasi (*rationalization*) yang menjadi alasan dominan mengapa individu sering terlibat dalam kegiatan penipuan di bidang pekerjaan. (Owusu, Koomson, Alipoe & Kani, 2022) mengatakan bahwa pada dasarnya dalam teori *fraud triangle* dijelaskan bahwa seseorang untuk terlibat dalam tindakan kecurangan harus memiliki tekanan yang ditimbulkan baik dari pekerjaan, keluarga dan teman, terdapatnya peluang dalam melakukan kecurangan dan pelaku penipuan biasanya akan berada dalam keadaan yang mudah untuk membenarkan tindakannya bukanlah merupakan tindakan yang salah tetapi merupakan suatu keperluan.

2.3 *Fraud Diamond*

Pandangan mengenai *fraud* kembali dibahas dan dikembangkan oleh Wolfe & Hermanson (2004) dengan nama *fraud diamond* dimana merupakan penyempurnaan dari teori sebelumnya yaitu *fraud triangle*. Wolfe & Hermanson berpendapat bahwa untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan pencegahan *fraud* perlu adanya penyempurnaan dari *fraud triangle* yaitu dengan menambahkan elemen keempat berupa kapabilitas (*capability*). Kecurangan pada perusahaan tidak mungkin terjadi tanpa orang serta kemampuan yang tepat dalam mengimplementasikan rincian penipuan.

Kassem & Higson (dalam Christian, Basri & Arafah, 2019) mengatakan terdapat empat hal yang dapat diamati dalam melakukan suatu tindakan kecurangan: (1) posisi (kekuasaan) atau fungsi otoritatif dalam organisasi, (2) kemampuan untuk memahami dan memanfaatkan kelemahan sistem akuntansi dan pengendalian intern, (3) keyakinan bahwa individu tersebut tidak akan terdeteksi atau jika tertangkap maka akan keluar dengan mudah dan (4) kemampuan dalam bersikap wajar bersama orang lain ketika dirinya melakukan perbuatan buruk atau menyimpang.

2.4 *Fraud Pentagon*

Fraud pentagon dikembangkan oleh Crowe Horwath pada tahun 2011. Teori ini menambahkan satu faktor mengenai latar belakang terjadinya *fraud* yaitu arogansi (*arrogance*). Arogansi dideskripsikan sebagai sikap superioritas dan keserakahan dari seseorang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak berlaku secara pribadi terhadap dirinya (Horwath, 2011). Maka dari itu terdapat 5 faktor yang terdapat dalam *fraud pentagon* yaitu:

1. Tekanan (*pressure*)
2. Kesempatan (*opportunity*)
3. Rasionalisasi (*rationalization*)
4. Kapabilitas (*capability*)
5. Arogansi (*arrogance*)

2.4.1 Tekanan (*Pressure*)

Shelton (2014) menyebutkan tekanan adalah motif seorang individu dalam melakukan suatu penipuan yang bisa berasal dari faktor finansial, kebiasaan buruk atau gaya hidup mewah, ataupun tekanan dari pihak luar. Setiap individu memiliki permasalahan yang berbeda-beda sehingga faktor tekanan yang terjadi dalam kecurangan juga beragam. Namun, pemicu utama sebuah *fraud* lebih sering dikarenakan faktor finansial atau keuangan (Handoyo, 2016). Menurut SAS No. 99 (dalam Martantya & Daljono, 2013) terdapat empat faktor tekanan yang dapat menyebabkan individu melakukan suatu tindak kecurangan yaitu sebagai berikut :

1. Stabilitas Keuangan (*Financial Stability*)

Setiap perusahaan dituntut untuk menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan stabil untuk mendapatkan perhatian dari investor. Namun, terdapat beberapa situasi dan kondisi yang terkadang menghambat kinerja perusahaan sehingga dapat mengganggu stabilitas keuangan perusahaan. Hal ini akan menyebabkan pihak manajemen perusahaan mencapai tujuan tersebut dengan berbagai macam cara termasuk melakukan kecurangan laporan keuangan.

2. Tekanan Eksternal (*External Pressure*)

Manajemen perusahaan merasakan tekanan secara berlebihan dalam memenuhi persyaratan atau permintaan dari pihak ketiga.

3. Target Keuangan (*Financial Target*)

Target keuangan adalah suatu besaran tingkat kinerja pada laba yang ingin dicapai atas kinerja yang telah dilakukan pihak perusahaan. Target keuangan akan memberikan tekanan secara tidak langsung kepada manajemen perusahaan untuk mencapai kesepakatan yang telah ditentukan oleh pejabat perusahaan sebelumnya (Hanifa & Laksito, 2015).

4. Kebutuhan Keuangan Individu (*Personal Financial Need*)

SAS No. 99 menyatakan bahwa tekanan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan akan dirasakan oleh manajer atau para eksekutif perusahaan ketika kondisi keuangan pribadinya terancam oleh kinerja keuangan perusahaan (Aprilia, 2017).

2.4.1.1 Stabilitas Keuangan (*Financial Stability*)

Kondisi keuangan perusahaan yang harus digambarkan dalam keadaan stabil karena cenderung lebih disukai dan dipercaya oleh para investor. *Statements on Auditing Standards (SAS) No. 99* (dalam Skousen, Smith, & Wright, 2009) mengatakan bahwa manajer akan memiliki tekanan dalam melakukan kecurangan pada laporan keuangan ketika *financial stability* perusahaan terancam oleh keadaan ekonomi, industri dan situasi perusahaan yang beroperasi. Penelitian ini mengukur *financial stability* dengan besarnya rasio perubahan total aset (ACHANGE) suatu perusahaan. Jumlah total aset perusahaan akan mencerminkan prospek kinerja perusahaan selama periode yang ditentukan.

2.4.2 Kesempatan (*Opportunity*)

Menurut Albrecht (2003) kesempatan merupakan suatu gambaran ketika individu merasa memiliki situasi dan kondisi yang mendukung dan memungkinkannya untuk melakukan tindak kecurangan pada sebuah perusahaan. Menurut Albrecht & Zimbelmen (dalam Akrom, 2021) terdapat enam hal yang menjadi penyebab munculnya kesempatan bagi individu dalam melakukan suatu kecurangan yaitu:

1. Minim kontrol dalam mencegah serta mendeteksi kecurangan
2. Ketidakmampuan dalam menilai suatu kualitas kinerja
3. Pelaku kecurangan tidak didisiplinkan dengan baik
4. Kurangnya pengawasan pada akses informasi
5. Ketidakmampuan dan ketidakpedulian dalam meminimalisir tindakan kecurangan
6. Kurangnya jejak audit

Menurut SAS No. 99 (dalam Martantya & Daljono, 2013) terdapat tiga faktor peluang atau kesempatan yang menyebabkan individu melakukan tindakan kecurangan, yaitu sebagai berikut :

1. Kondisi Industri (*Nature of Industry*)

Kondisi industri adalah kondisi ideal suatu perusahaan dalam industri yang dapat diukur melalui akun piutang di laporan keuangan. Ada

beberapa akun yang terdapat di laporan keuangan dimana besarnya saldo ditentukan oleh perusahaan berdasarkan suatu estimasi, misalnya akun piutang tak tertagih dan akun persediaan usang sehingga memungkinkan manajemen untuk melakukan manipulasi (Kabila, 2019).

2. Ketidakefektifan Pengawasan (*Ineffective Monitoring*)

Menurut *American Institute of Certified Public Accountant* (2002), *ineffective monitoring* merupakan suatu keadaan dimana pengendalian internal yang terdapat didalam perusahaan tidak berjalan secara efektif sehingga menimbulkan peluang melakukan tindakan kecurangan. Salah satu hal yang menyebabkan terdapatnya ketidakefektifan pengawasan didalam perusahaan yaitu adanya dominasi manajemen yang dilakukan oleh satu atau sekelompok orang.

3. Struktur Organisasional (*Organizational Structure*)

Struktur organisasi yang kompleks dan tidak stabil. Contohnya perangkapan jabatan yang mengurangi efektifitas pengawasan, perputaran personil perusahaan seperti senior manajer atau direksi yang tinggi.

2.4.2.1 Efektivitas Pengawasan (*Effective Monitoring*)

Effective monitoring menggambarkan bahwa didalam perusahaan terdapat pengawasan yang efektif guna melihat kinerja manajemen. Beasley (1999) mengatakan bahwa dewan komisaris independen adalah individu dari luar perusahaan yang dapat digunakan untuk mencegah tindakan kecurangan. Maka dari itu, dewan komisaris independen yang semakin banyak dapat menjadi suatu solusi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Meningkat atau efektifnya sistem pengawasan terhadap kinerja perusahaan akan meminimalkan peluang tindakan kecurangan di dalam suatu perusahaan. Pada penelitian ini, *effective monitoring* diukur dengan menggunakan rasio jumlah dewan komisaris independen (BDOUT).

2.4.3 Rasionalisasi (*Rationalization*)

Rasionalisasi didefinisikan sebagai tindakan yang dijadikan semacam pembenaran dikarenakan adanya perilaku menyimpang yang dilakukan oleh seorang individu (Albrecht, 2003). Elemen rasionalisasi diperlukan oleh seorang pelaku agar dapat mencerna tindakan melanggar hukum berupa kecurangan yang telah dilakukannya dalam mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Hal ini merupakan naluri ilmiah manusia. Ketika melakukan tindakan kejahatan pertama kali, terdapat perasaan tidak enak. Namun ketika kejahatan tersebut diulangi kembali maka hal tersebut akan menjadi mudah sehingga selanjutnya akan menjadi hal yang biasa bagi pelaku tersebut. Ketika ingin melakukan kejahatan pertama kalinya, pelaku akan segera mencari pembenaran atau pembelaan mengenai tindakan kecurangan yang akan dilakukannya. Menurut Karyono (dalam Ulfah & Wijaya, 2017) bahwa pelaku kecurangan mencari pembenaran misalnya berupa:

1. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap sebagai hal yang biasa terjadi atau wajar dan bahkan dilakukan juga oleh orang lain.
2. Pelaku merasa sudah berjasa bagi organisasinya sehingga seharusnya ia bisa mendapatkan lebih dari apa yang telah diterimanya.
3. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku dianggap memiliki tujuan yang baik dalam mengatasi masalah yang terdapat di perusahaan.

Setelah kejahatan yang dilakukan pelaku tersebut berhasil, kejahatan selanjutnya tidak akan memerlukan rasionalisasi semacam itu lagi (Tuanakotta, 2010). Individu yang tidak memiliki keinginan untuk melakukan tindak kecurangan dapat bertindak sebaliknya yaitu melakukan kecurangan karena adanya rasionalisasi dalam mengganggu kecurangan tersebut adalah hal yang biasa terjadi. Elemen rasionalisasi yang terdapat dalam penelitian ini akan diukur menggunakan *change in auditor* (AUDCHANGE). Jika manajemen perusahaan mengganti auditor eksternal maka dianggap memiliki indikasi menghilangkan jejak pendeteksian kecurangan yang telah ditemukan. Selain itu, auditor eksternal baru dianggap masih belum memahami kondisi perusahaan dan membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri sehingga pemeriksaan terhadap laporan keuangan perusahaan

menjadi tidak efektif dan pihak manajemen dapat terus melakukan tindakan kecurangan yang tidak ditemukan oleh pihak auditor.

2.4.4 Kapabilitas (*Capability*)

Kapabilitas adalah seberapa besar kekuatan dan kapasitas seseorang untuk melakukan kecurangan didalam perusahaan (Apriliana & Agustina, 2017). Seorang individu harus memiliki kemampuan untuk dapat melakukan tindakan kecurangan secara berulang kali layaknya pintu yang terbuka (Wolfe & Hermanson, 2004). Elemen kapabilitas ini diumpamakan sebagai gerbang masuk bagi seorang pelaku kecurangan, kemudian elemen lainnya seperti tekanan dan rasionalisasi merupakan dorongan bagi pelaku melakukan kecurangan. Wolfe & Hermanson (2004) mengatakan terdapat 6 kategori individu dengan kapabilitas untuk melakukan tindak kecurangan:

1. Jabatan maupun kekuasaan seorang individu dapat menciptakan celah untuk melakukan tindakan kecurangan yang mungkin tidak dimiliki oleh jabatan atau kekuasaan orang lain
2. Individu yang cukup pandai dalam memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal serta menggunakan posisi, jabatan, atau akses kewenangannya bagi keuntungan terbesar dirinya sendiri
3. Individu yang memiliki ego dan kepercayaan diri tinggi bahwa dirinya tidak akan terdeteksi. Jika individu tersebut terdeteksi, maka individu tersebut dapat keluar dengan mudah dari masalahnya karena dapat dengan mudah bernegosiasi
4. Individu yang berhasil melakukan tindakan kecurangan merupakan individu yang persuasif atau dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan tindakan kecurangan
5. Individu pintar dalam berbohong sehingga skenario yang dilakukan tetap efektif dan konsisten dalam melakukan tindakan kecurangan

6. Individu yang sukses mengendalikan stres dengan baik, karena mengelola sebuah penipuan dalam jangka waktu yang lama sangat meningkatkan stres

Dalam penelitian ini elemen *capability* diproksikan menggunakan *change in directors* (DCHANGE). Pergantian direksi tidak selamanya dapat menimbulkan hal baik, pergantian direksi dapat menimbulkan *stress period* didalam perusahaan karena direksi yang baru belum memahami kondisi perusahaan sehingga dapat membuka pintu atau celah bagi pihak lain untuk melakukan tindak kecurangan.

2.4.5 Arogansi (*Arrogance*)

Arogansi adalah sikap superioritas dan memamerkan posisi yang dimilikinya serta adanya pemikiran bahwa dirinya akan kebal terhadap pengendalian internal perusahaan (Horwath, 2011). Sifat ini muncul karena seseorang mementingkan dirinya sendiri dalam manajemen perusahaan sehingga menyebabkan semakin besar arogansi yang dimilikinya dan menyebabkan timbulnya pemikiran bahwa dirinya tidak akan ketahuan jika melakukan kecurangan. Apabila ia tertangkap maka tidak ada yang berani melaporkannya karena posisi dan kekuasaan yang dimilikinya. Horwath (2011) menjelaskan bahwa terdapat 5 elemen arogansi dari perspektif CEO, yaitu:

1. Ego yang besar dimana CEO lebih dipandang sebagai selebriti daripada pengusaha
2. Kebal terhadap pengendalian internal dan tidak tertangkap
3. Memiliki sikap menekan
4. Menerapkan gaya manajemen otokratis
5. Kecenderungan takut kehilangan jabatan serta kekuasaan miliknya

Elemen arogansi pada penelitian ini diproksikan dengan variabel *political connection* (POLITICAL). Pihak manajemen puncak perusahaan seperti dewan komisaris yang memiliki rangkap jabatan sebagai anggota partai politik, pejabat pemerintahan atau pejabat militer dapat menggunakan kuasanya untuk menutupi

tindakan kecurangan yang mungkin dilakukannya. Hal ini akan menyebabkan munculnya sifat sombong atau angkuh karena mereka berpikir kontrol internal tidak akan mengenai dirinya atas peran dan kontribusi yang telah diberikannya terhadap perusahaan.

2.5 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan dijelaskan sebagai hubungan kontrak antara dua belah pihak yaitu pemilik (prinsipal) dan manajer (agen). Hubungan ini merupakan kegiatan perusahaan yang diperintahkan oleh prinsipal dan wewenang diberikan kepada agen untuk membuat keputusan terbaik demi kepentingan prinsipal. Dalam teori agensi ini, pihak prinsipal ditujukan kepada para pemegang saham ataupun investor sedangkan pihak agen ditujukan kepada manajemen perusahaan. Namun seiring berjalannya waktu, terdapat suatu kondisi yang dapat menimbulkan permasalahan jika pihak prinsipal dan agen memiliki keinginan yang saling bertentangan.

Kaitannya teori agensi dengan perilaku kecurangan dalam perusahaan yaitu munculnya asimetri informasi dikarenakan pihak agen memiliki lebih banyak informasi mengenai operasional dan kinerja perusahaan daripada pihak prinsipal. Kondisi tersebut akan menimbulkan kesempatan yang lebih besar bagi pihak agen untuk melakukan tindakan yang dapat menguntungkan dirinya sendiri. Kondisi ini berkaitan dengan sifat dasar manusia yang mana cenderung akan memprioritaskan kepentingan dasarnya terlebih dahulu baru kemudian akan memenuhi kebutuhan pihak lainnya. Selain itu terdapat kemungkinan munculnya perbedaan konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan pihak agen. Pihak agen yang diasumsikan sebagai pihak manajemen perusahaan pasti ingin menyajikan laporan keuangan yang baik kepada pihak prinsipal dalam kondisi dan situasi apapun untuk mempertahankan citra perusahaannya. Sedangkan pihak prinsipal yang kita asumsikan sebagai pemegang saham pasti lebih menginginkan laporan keuangan yang baik, riil dan sesuai dengan kondisi perusahaan. Hal ini akan membuat pihak agen cenderung dapat melakukan berbagai macam cara dalam memenuhi

kepentingan prinsipal yang mana salah satunya berupa memanipulasi laporan keuangan perusahaan.

Dengan adanya asimetri informasi dan konflik kepentingan didalam teori agensi ini maka diperlukan adanya tindakan pendeteksian kecurangan didalam sebuah perusahaan sehingga dapat meminimalkan potensi kecurangan dan fungsi laporan keuangan sesungguhnya dapat digunakan dengan baik dan bijak.

2.6 Hasil Penelitian Terdahulu

Pendeteksian kecurangan laporan keuangan menggunakan teori *fraud pentagon* telah dilakukan oleh banyak peneliti dengan menggunakan variabel independen, periode tahun, objek penelitian yang berbeda serta menghasilkan hasil penelitian yang berbeda-beda pula. Beberapa penelitian yang dijadikan hasil penelitian terdahulu oleh penulis akan dirangkum dibawah ini. Penelitian mengenai pendeteksian kecurangan laporan keuangan yang dilakukan oleh Apriliana & Agustina (2017) dengan objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2013-2015. Hasil dari penelitian tersebut berupa *external auditor quality*, *frequent number of CEO's picture* dan *financial stability* memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraudulent financial reporting*. Variabel lainnya yaitu *changes in auditor*, *institutional ownership*, *director change*, *financial target*, *effective monitoring* dan *liquidity* tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraudulent financial reporting*. Pada penelitian ini *financial stability* terbukti memiliki pengaruh terhadap *fraudulent financial statement*. Hal ini didukung oleh fakta bahwa kecurangan laporan keuangan cenderung dilakukan oleh perusahaan dengan jumlah total aset yang rendah guna memikat perhatian para investor berinvestasi. Jumlah aset perusahaan yang tergolong kecil di periode sebelumnya juga merupakan salah satu alasan bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan dalam meningkatkan total asetnya.

Hadiani, Rizani & Nailiah (2022) melakukan penelitian mengenai pendeteksian kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di BEI periode tahun 2015-2019. Hasil penelitian tersebut berupa target keuangan dan pergantian direksi memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan

keuangan. Variabel lainnya yaitu ketidakefektifan pengawasan, pergantiana auditor dan rangkap jabatan tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya potensi kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian ini, dikatakan pergantian direksi memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Dikatakan bahwa pergantian direksi bertujuan untuk memperbaiki kinerja manajemen sehingga semakin banyak pergantian direksi dilakukan maka potensi kecurangan laporan keuangan semakin menurun.

Penelitian selanjutnya mengenai pendeteksian kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh Yanti (2021) dengan objek penelitian berupa perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2017-2019. Hasil penelitian tersebut berupa *quality of external auditor*, *nature of industry* dan *financial target* memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Variabel lainnya yaitu *frequent number of CEO's picture*, *change in director* dan *change in auditor* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini mendapatkan hasil dimana *change in auditor* berpengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Dikatakan bahwa perusahaan yang sering mengganti auditor dapat memperkecil deteksi *fraud* dalam laporan keuangan, hal ini disebabkan karena auditor baru membutuhkan lebih banyak waktu untuk beradaptasi dan memahami perusahaan serta laporan keuangannya. Maka dari itu, manajemen merasa bebas serta leluasa dalam meningkatkan keuntungan dan kesejahteraan pribadinya.

Penelitian selanjutnya mengenai pendeteksian kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh Tiffani & Marfuah (2015) dengan objek penelitian perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2011-2013. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini berupa variabel *external pressure* dan *financial stability* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan dan variabel *effective monitoring* memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Untuk variabel lainnya seperti *rationalization*, *financial target*, *nature of industry* dan *personal financial need* tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Dalam penelitian ini, dikatakan *effective monitoring* berpengaruh negatif signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Setelah

dilakukan penelitian, ditemukan bahwa semakin tinggi efektifitas pengawasan perusahaan akan menurunkan potensi manajemen untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini mengukur efektivitas pengawasan menggunakan komisaris independen. Artinya yaitu semakin banyak jumlah komisaris independen yang terdapat didalam perusahaan maka akan menyebabkan pengawasan yang efektif sehingga tindakan kecurangan dapat diminimalisir.

Penelitian selanjutnya mengenai pendeteksian kecurangan laporan keuangan dilakukan oleh Cahyani, Nuraina & Styaningrum (2021) dengan objek penelitian perusahaan properti, *real estate* dan konstruksi bangunan yang terdapat di BEI periode 2015-2017. Hasil penelitian tersebut berupa *political connection*, *change of director*, *external pressure*, *auditor change*, *ineffective monitoring*, *auditor opinion* dan *external auditor quality* memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraudulent financial reporting*. Sedangkan *CEO image frequency*, *financial stability*, *financial target* dan *institusional ownership* tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya *fraudulent financial reporting*. Dikatakan bahwa variabel *political connection* dalam penelitian ini berpengaruh terhadap terjadinya *fraudulent financial reporting*. Rangkap jabatan yang dimiliki dalam partai politik, pejabat pemerintah seringkali berdampak dalam pengambilan keputusan bisnis. Untuk lebih jelasnya dibawah ini terdapat tabel mengenai penelitian terdahulu yang telah dirangkum oleh peneliti untuk dijadikan acuan didalam penelitian ini.

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

| Peneliti | Objek Penelitian | Variabel yang Digunakan | Hasil Penelitian |
|---------------------------|---|---|--|
| (Tiffani & Marfuah, 2015) | Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013 | $X_1 = \textit{Financial target}$ $X_2 = \textit{Financial stability}$ $X_3 = \textit{Personal financial need}$ | 1. <i>Financial stability & external pressure</i> memiliki pengaruh positif terhadap |

| | | | |
|------------------------------|---|---|---|
| | | <p>$X_4 = \textit{Effective monitoring}$</p> <p>$X_5 = \textit{Nature of industry}$</p> <p>$X_6 = \textit{External pressure}$</p> <p>$X_7 = \textit{Rationalization}$</p> <p>$Y = \textit{Fraudulent financial reporting}$</p> | <p>kecurangan laporan keuangan</p> <p>2. <i>Effective monitoring</i> memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan</p> <p>3. <i>Rationalization, financial target, nature of industry</i> dan <i>personal financial need</i> tidak memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan</p> |
| (Apriliana & Agustina, 2017) | Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015 | <p>$X_1 = \textit{Financial target}$</p> <p>$X_2 = \textit{Financial stability}$</p> <p>$X_3 = \textit{Effective monitoring}$</p> <p>$X_4 = \textit{Institusional ownership}$</p> <p>$X_5 = \textit{Changes in auditor}$</p> <p>$X_6 = \textit{External auditor quality}$</p> <p>$X_7 = \textit{Director change}$</p> <p>$X_8 = \textit{Liquidity}$</p> | <p>1. <i>Financial stability, external auditor quality</i> dan <i>frequent number of CEO's picture</i> memiliki pengaruh terhadap terjadinya <i>fraudulent financial reporting</i></p> <p>2. <i>Financial target, liquidity, institutional ownership, effective monitoring, changes in auditor</i> dan <i>director change</i></p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | <p>$X_9 = \text{Frequent number of CEO's picture}$</p> <p>$Y = \text{Fraudulent financial reporting}$</p> | <p>tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya <i>fraudulent financial reporting</i></p> |
| (Cahyani, Nuraina & Styaningrum, 2021) | <p>Perusahaan properti, <i>real estate</i> dan konstruksi bangunan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017</p> | <p>$X_1 = \text{Financial target}$</p> <p>$X_2 = \text{Financial stability}$</p> <p>$X_3 = \text{Ineffective monitoring}$</p> <p>$X_4 = \text{Institutional ownership}$</p> <p>$X_5 = \text{External pressure}$</p> <p>$X_6 = \text{Auditor change}$</p> <p>$X_7 = \text{Auditor's opinion}$</p> <p>$X_8 = \text{External auditor quality}$</p> <p>$X_9 = \text{Change of director}$</p> <p>$X_{10} = \text{CEO image frequency}$</p> <p>$X_{11} = \text{Political connection}$</p> <p>$Y = \text{Fraudulent financial reporting}$</p> | <p>1. <i>External pressure, ineffective monitoring, external auditor quality, auditor change, auditor opinion, change of director</i> dan <i>political connection</i> memiliki pengaruh terhadap terjadinya <i>fraudulent financial reporting</i></p> <p>2. <i>Financial target, financial stability, institutional ownership</i> dan <i>CEO image frequency</i> tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya <i>fraudulent financial reporting</i></p> |
| (Yanti, 2021) | <p>Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa</p> | <p>$X_1 = \text{Financial target}$</p> <p>$X_2 = \text{Nature of industry}$</p> | <p>1. <i>Financial target, nature of industry</i> dan <i>quality of</i></p> |

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| | Efek Indonesia periode 2017-2019 | <p>$X_3 = \text{Change of auditor}$</p> <p>$X_4 = \text{Quality of external auditor}$</p> <p>$X_5 = \text{Change of director}$</p> <p>$X_6 = \text{Frequent number of CEO's picture}$</p> <p>$Y = \text{Kecurangan laporan keuangan}$</p> | <p><i>external auditor</i> berpengaruh tidak signifikan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan</p> <p>2. <i>Change in auditor, change in director dan frequent number of CEO's picture</i> berpengaruh signifikan terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan</p> |
| (Aviantara, 2021) | Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tahun 2014-2018 | <p>$X_1 = \text{Financial stability}$</p> <p>$X_2 = \text{Pergantian direksi}$</p> <p>$X_3 = \text{Audit fee}$</p> <p>$X_4 = \text{E-procurement}$</p> <p>$X_5 = \text{Pergantian komite audit}$</p> <p>$X_6 = \text{Whistleblowing system}$</p> <p>$X_7 = \text{Government ownership}$</p> <p>$X_8 = \text{CEO education}$</p> <p>$X_9 = \text{CEO military}$</p> | <p>1. <i>Financial stability, pergantian direksi, audit fee, e-procurement, pergantian komite audit, whistleblowing system dan government ownership</i> berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan</p> <p>2. <i>CEO education dan CEO military</i> tidak</p> |

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| | | Y = Kecurangan laporan keuangan | berpengaruh terhadap terjadinya kecurangan laporan keuangan |
| (Achmad, Ghozali & Pamungkas, 2022) | Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2016-2020 | $X_1 = \textit{External pressure}$ $X_2 = \textit{Financial stability}$ $X_3 = \textit{Ineffective monitoring}$ $X_4 = \textit{Change in auditor}$ $X_5 = \textit{Change in director}$ $X_6 = \textit{Arrogance}$ $X_7 = \textit{Collusion}$ Y = <i>Fraudulent financial reporting</i> | <ol style="list-style-type: none"> <i>External pressure</i> dan <i>financial stability</i> memiliki pengaruh positif terhadap terjadinya <i>fraudulent financial reporting</i> <i>Ineffective monitoring</i>, <i>change in auditor</i>, <i>change in director</i>, <i>arrogance</i> dan <i>collusion</i> tidak memiliki pengaruh terhadap terjadinya <i>fraudulent financial reporting</i> |
| (Hadiani, Rizani & Nailiah, 2022) | Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019 | $X_1 = \textit{Target keuangan}$ $X_2 = \textit{Ketidakefektifan pengawasan}$ $X_3 = \textit{Pergantian auditor}$ $X_4 = \textit{Pergantian direksi}$ $X_5 = \textit{Rangkap jabatan}$ | <ol style="list-style-type: none"> Target keuangan dan pergantian direksi, memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan Ketidakefektifan pengawasan, pergantian auditor |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | $X_6 =$ Kerja sama dengan proyek pemerintah $Y =$ Kecurangan laporan keuangan | dan rangkap jabatan tidak memiliki pengaruh terhadap potensi kecurangan laporan keuangan |
|--|--|--|--|

2.7 Pengembangan Hipotesis

2.7.1 Pengaruh *Financial Stability* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Financial stability merupakan suatu tolak ukur yang sangat penting dalam menilai suatu kinerja perusahaan dengan melihat kondisi keuangannya. Namun, ada beberapa faktor yang dapat membuat kondisi keuangan perusahaan menjadi tidak stabil. Statements on Auditing Standards (SAS) No. 99 mengatakan manajer akan memiliki tekanan dalam melakukan kecurangan pada laporan keuangan ketika *financial stability* perusahaan terancam oleh keadaan ekonomi, industri dan situasi perusahaan yang beroperasi. Pihak manajemen perusahaan dapat melakukan tindak kecurangan berupa manipulasi pada jumlah aset yang tidak semestinya agar dapat meningkatkan citra baik pada perusahaan.

Pada penelitian ini *financial stability* diukur dengan besarnya rasio perubahan total aset (ACHANGE) yang dimiliki suatu perusahaan. Rahmanti (dalam Apriliana & Agustina, 2017) mengatakan bahwa prospek kinerja suatu perusahaan dapat dilihat melalui aset yang dimiliki oleh perusahaan karena merupakan cerminan dari kekayaan perusahaan. Jumlah total aset yang dimiliki perusahaan dapat mengindikasikan besar atau kecilnya ukuran suatu perusahaan. Aviantara (2021) mengatakan bahwa semakin besar jumlah total aset perusahaan maka cenderung lebih diminati oleh para investor karena dianggap dapat memberikan *return* yang maksimal dan memiliki kinerja perusahaan yang baik. Skousen, Smith & Wright (2009) mengatakan bahwa rasio perubahan total aset yang semakin besar pada perusahaan akan menyebabkan semakin tingginya kemungkinan terjadinya kecurangan laporan keuangan perusahaan. Mulford (dalam Suryawan & Budiasih, 2021) mengatakan bahwa persentase perubahan total aset

dapat mengindikasikan terjadinya kecurangan laporan keuangan karena tingginya persentase perubahan total aset sebagai cara untuk menunjukkan *earning power* perusahaan dan posisi finansial yang lebih kuat.

Penelitian yang telah dilakukan oleh Apriliana & Agustina (2017) dan Achmad, Ghozali & Pamungkas (2022) juga menunjukkan bahwa *financial stability* memiliki pengaruh positif terhadap potensi kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka hipotesis pertama dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut:

$H_1 = \text{Financial stability}$ berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan

2.7.2 Pengaruh *Effective Monitoring* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Salah satu kondisi yang menyebabkan terdapatnya peluang dalam tindakan kecurangan dikarenakan minimnya kontrol pada perusahaan dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*. Skousen dalam (Apriliana & Agustina, 2017) mengatakan tindakan kecurangan didalam perusahaan dapat diminimalisir salah satunya dengan menerapkan pengawasan yang baik. Agar pengawasan dapat berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan peran serta campur tangan suatu manajemen perusahaan. Manajemen erat kaitannya dengan dewan komisaris karena mereka dapat mengawasi jalannya perusahaan (Achmad, Ghozali & Pamungkas, 2022). Dewan komisaris bertugas untuk memberikan nasihat dan mengawasi kinerja manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis guna kepentingan investor. Dewan komisaris terdiri dari dewan komisaris independen dan dewan komisaris non independen. Hanifa & Laksito (2015) mengatakan *fraud* dapat diminimalisir dengan cara meningkatkan efektivitas pengawasan melalui dewan komisaris independen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 33 menjelaskan dewan komisaris independen sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak memiliki saham secara langsung ataupun tidak langsung pada perusahaan terkait dan tidak terafiliasi dengan pihak manapun, terutama investor,

direksi atau komisaris lainnya serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya untuk menjaga profesionalisme dan independensi. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik Pasal 20 disebutkan bahwa jumlah dewan komisaris paling sedikit berjumlah 2 orang dimana salah 1 diantaranya wajib merupakan komisaris independen. Jika jumlah dewan komisaris lebih dari 2 orang maka persentase jumlah komisaris independen wajib paling sedikit 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Siddiq (dalam Sagala & Siagian, 2021) mengatakan bahwa tindakan kecurangan laporan keuangan dapat dihindari dengan banyaknya jumlah komisaris independen di dalam sebuah perusahaan karena akan menyebabkan semakin efektifnya sistem pengawasan terhadap kinerja perusahaan. *Effective monitoring* ini diukur dengan menggunakan jumlah dewan komisaris independen dibagi dengan total dewan komisaris yang berada didalam sebuah perusahaan. Andayani (dalam Hidayah & Saptarini, 2019) mengatakan bahwa potensi tindakan kecurangan laporan keuangan yang dapat dilakukan oleh agen dapat diminimalisir dengan pengawasan yang berjalan efektif di dalam sebuah perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tiffani & Marfuah (2015) juga menunjukkan bahwa *effective monitoring* memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka hipotesis kedua dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut:

$H_2 = \textit{Effective monitoring}$ berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan

2.7.3 Pengaruh *Change in Auditor* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Rasionalisasi mengarah kepada perilaku kecurangan seorang individu yang memiliki pembenaran atas tindakan yang dilakukannya walaupun sebenarnya perbuatan tersebut merupakan perilaku yang menyimpang. Elemen rasionalisasi diprosikan dengan *change in auditor*. Auditor memiliki peran untuk meninjau kembali isi dari laporan keuangan perusahaan telah sesuai atau relevan dengan

kondisi sesungguhnya perusahaan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memberikan penilaian terhadap kewajaran laporan keuangan yang telah dibuat oleh pihak manajemen perusahaan. Auditor eksternal dianggap memiliki sikap independensi sehingga dikatakan sebagai pihak yang paling tepat dalam mengungkap tindak kecurangan (Apriliana & Agustina, 2017). Maka dari itu, jika suatu perusahaan cenderung berulang kali melakukan pergantian auditor eksternal dapat mengindikasikan terjadinya sebuah kecurangan didalam perusahaan. Pergantian auditor yang terdapat di perusahaan dapat menjadi salah satu cara untuk menghilangkan jejak kecurangan yang terdeteksi oleh auditor sebelumnya (Achmad, Ghozali & Pamungkas, 2022).

Perusahaan dapat mengurangi kemampuan pendeteksian kecurangan laporan keuangan dengan cara mengganti auditor (Lou & Wang, 2011). Auditor baru akan membutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menyesuaikan diri dengan kondisi perusahaan secara keseluruhan sehingga terdapat kemungkinan untuk mengabaikan adanya aktivitas kecurangan. Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk mengganti auditor dari waktu ke waktu guna mengendalikan tindakan kecurangan yang dilakukan. Hal ini akan menyebabkan tindakan kecurangan oleh manajemen tidak terdeteksi oleh auditor eksternal. Secara berkelanjutan manajemen akan kembali melanjutkan tindakan kecurangan laporan keuangan dan menganggap hal tersebut wajar karena kecurangan tersebut bukan merupakan temuan auditor eksternal. Maka dari itu, jika perusahaan sering melakukan pergantian auditor maka dapat dicurigai sebagai upaya dalam menutupi tindakan kecurangan yang dilakukan (Apriliana & Agustina, 2017).

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Yanti (2021) dan Cahyani, Nuraina & Styaningrum (2021) juga menyatakan bahwa *change in auditor* memiliki pengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka hipotesis ketiga dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut:

$H_3 = \text{Change in auditor}$ berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan

2.7.4 Pengaruh *Change in Directors* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Kapabilitas didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam melakukan kecurangan di lingkungan perusahaan. Wolfe & Hermanson (2004) mengatakan bahwa kecurangan tidak akan bisa direalisasikan tanpa seorang individu yang memang memiliki kemampuan atau kompetensi untuk melakukan kecurangan dengan baik. Para pelaku kecurangan dipercaya walaupun memiliki tekanan, kesempatan untuk menipu dan rasionalisasi ideologi, mereka tidak bisa menutupi tindakan kecurangan kecuali mereka memiliki kemampuan atau kapabilitas untuk melakukannya (Lionardi & Suhartono, 2022). Wolfe & Hermanson (2004) menjelaskan bahwa suatu posisi atau jabatan seorang individu dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya kecurangan di dalam sebuah perusahaan. Maka dari itu, posisi CEO, direksi, ataupun kepala divisi merupakan posisi yang diuntungkan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan karena jabatan atau kekuasaan yang dimilikinya.

Pergantian direksi yaitu penyerahan wewenang dari direksi lama kepada direksi baru. Perubahan direksi dalam perusahaan yang dijelaskan dalam laporan tahunan dapat terjadi karena terdapatnya pengalihan wewenang dan hasil dari RUPS. Terdapatnya pergantian direksi didalam perusahaan yaitu untuk mendapatkan direksi yang lebih cakap dan dapat bekerja lebih maksimal dari direksi periode sebelumnya guna memperkuat kinerja perusahaan (Achmad et al., 2022). Ruankaew (dalam Apriliana & Agustina, 2017) mengungkapkan bahwa jika pemangku kepentingan tertinggi di perusahaan menginginkan peningkatan kinerja perusahaan, hal itu dapat dilakukan dengan merekrut direksi yang lebih kompeten dari yang sebelumnya. Maka dari itu dengan terdapatnya pergantian direksi dapat mengurangi tindakan kecurangan didalam perusahaan karena perekrutan direksi baru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja perusahaan dari periode sebelumnya.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hadiani, Rizani & Nailiah (2022) dikatakan bahwa *change in directors* memiliki pengaruh negatif

terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka hipotesis keempat dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut:

H₄ = *Change in directors* berpengaruh negatif terhadap kecurangan laporan keuangan

2.7.5 Pengaruh *Political Connection* terhadap Kecurangan Laporan Keuangan

Marks (2012) (dalam Rizqi & Purwanto, 2022) mengatakan bahwa arogansi adalah sifat yang dimiliki oleh seorang individu dimana ia merasa memiliki kuasa atas sesuatu dan pengendalian internal tidak akan berlaku kepadanya. Mohamed, Khair & Simon (2015) mengatakan bahwa elemen arogansi dapat diukur melalui manajemen puncak perusahaan yang merangkap jabatan menjadi seorang politisi. Tingkat arogansi serta superioritas tinggi yang dimiliki seorang individu dapat menimbulkan potensi kecurangan karena mereka merasa bahwa pengendalian internal apapun tidak berlaku baginya (Apriliana & Agustina, 2017). Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 108 ayat (1) dikatakan dewan komisaris memiliki tanggungjawab untuk melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada dewan direksi. Dewan komisaris yang terkoneksi politik dapat mempengaruhi dewan direksi untuk mengambil keputusan yang mungkin memiliki konflik kepentingan lain. Terdapatnya peran ganda sebagai politisi yang ada pada manajemen puncak perusahaan seperti dewan komisaris juga dapat membantu memperlancar bisnis suatu perusahaan dengan memanfaatkan jabatan dan relasi luas yang dimiliki (Putra & Wobowo, 2021). Perusahaan dengan manajemen puncak perusahaan yang memiliki koneksi politik cenderung ingin memiliki laporan keuangan yang baik untuk menjaga reputasinya, termasuk melakukan manipulasi laporan keuangan (Haqq & Budiwitjaksono, 2019). Hal ini akan menimbulkan sifat angkuh atau sombong dimana dewan komisaris merasa bahwa kelancaran bisnis perusahaan berkat kontribusi dan peran yang telah dilakukannya.

Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN menyatakan bahwa pengurus partai politik dilarang memegang jabatan sebagai direksi dan komisaris BUMN, terkecuali untuk anggota atau kader partai boleh menjabat sebagai direksi dan dewan komisaris BUMN. Faccio (dalam Kristanto, 2019) mengategorikan sebuah perusahaan memiliki hubungan politik jika paling tidak satu pemegang saham yang memiliki sedikitnya 10% hak suara atau manajemen puncak perusahaan pernah menjabat atau sedang menjabat sebagai anggota militer, anggota parlemen atau anggota suatu partai politik. Penelitian ini menggunakan kriteria hubungan politik dewan komisaris yang mengacu pada penelitian yang digunakan oleh Fan, Wong & Zhang (dalam Matangkin & Mardiana, 2018) yaitu sebagai berikut :

1. Komisaris rangkap jabatan sebagai politisi yang berafiliasi dengan partai politik, pejabat pemerintahan atau pejabat militer.
2. Komisaris merupakan mantan pejabat pemerintahan atau mantan pejabat militer (purnawirawan polisi atau TNI).

Berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Matangkin & Mardiana (2018) dan Cahyani, Nuraina & Styaningrum (2021) dikatakan bahwa *political connection* memiliki pengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan. Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan maka hipotesis kelima dalam penelitian ini diajukan sebagai berikut:

$H_5 = Political\ connection$ berpengaruh positif terhadap kecurangan laporan keuangan